(JAKP) Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik
Vol. IV Nomor 1 April 2019
ISSN: 2301-4342 (Print), 2657-0092 (Online)
Available Online at http://jakp.fisip.unand.ac.id

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN SEBAGAI BENTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BELAWAN KOTA MEDAN

Simson Ginting
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darma Agung
Simson_gs@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out whether PT. (Persero) Indonesia's Port of Belawan Main Branch I have been doing local community empowerment activities (its environment) and what are the factors that hampered and supporters in the activities of the community empowerment. This research was qualitative research with a descriptive method, i.e. the research procedure that generates descriptive data in the form of the written word or spoken and the behavior of people who observed, i.e. the existing community around the the environment of PT Persero Indonesia's Port I main branch of Belawan, through interviews, observation and documentation. Community empowerment in the environs of PT. (Persero) Indonesia's Port I main branch of Belawan in partnerships program with small businesses and Community Development Program is still limited to venture capital lending, assistance towards victims of natural disasters, aid (contribution) of education, and public development assistance. This is more emphasize the economic and development dimensions rather than the social and science and technology dimensions. Obstacles faced was the lack of funds for the implementation of the community development program and partnership as well as a lack of field employee that is in charge of providing training and education for the built community. The surrounding community is not directly involved in policy making to support community empowerment activities. Likewise in solving problems by allowing problems to occur, without providing assistance for their resolution. Like when partner experience obstacles in repaying loan capital, they just bill to the place of the business partners. If it doesn't already exist, it will be billed the following month, without any assistance how to solve the problem.

Keywords: *Community Empowerment, Program partnerships with small businesses, and Community Development Program*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan telah melakukan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Setempat (Lingkungannya) dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati, yakni masyarakat yang ada disekitar lingkungan PT. Persero Pelabuhan I Cabang Utama Belawan, melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Pemberdayaan Masyarakat di lingkungan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan dalam Program Kemitraan Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan masih sebatas pemberian pinjaman modal usaha bantuan terhadap korban bencana alam, bantuan (sumbangan) pendidikan dan bantuan pembangunan fasilitas umum. Hal ini lebih mengedepankan dimensi ekonomi dari pembangunan dari pada dimensi sosial dan iptek. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya dana bagi pelaksanaan program bina lingkungan dan kemitraan serta kurangnya tenaga lapangan yang bertugas memberikan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat binaan.

Masyarakat sekitar tidak dilibatkan secara langsung dalam pengambilan kebijakan guna mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat. Begitu juga dalam penyelesaian masalah dengan membiarkan masalah terjadi, tanpa memberikan pendampingan untuk penyelesaiannya. Seperti ketika masyarakat mengalami kendala dalam pengembalian modal pinjaman, hanya menagihnya ke tempat usaha para mitra tersebut. Jika belum ada maka akan ditagih pada bulan berikutnya, tanpa ada pendampingan bagaimana agar masalah tersebut dapat diselesaikan

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Program Kemitraan Dengan Usaha Kecil, dan Program Bina Lingkungan

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu meningkatkan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Pembangunan nasional merupakan pencerminan keinginan untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.

Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat, swasta dan pemerintah. Masyarakat dan swasta adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Baik pemerintah, masyarakat dan swasta memiliki peranan dalam memajukan kehidupan bersama di tengah masyarakat, dimana salah satunya adalah melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki situasi dan kondisi yang ada dengan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya yang ada melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang dapat memberdayakan yang biasanya melalui pembinaan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta, sesuai dengan masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat tersebut.

Adapun penelitian yang telah dilakukan dalam hal pemberdayaan masyarakat antara lain yang ditulis oleh Oman Sukmana (HUMANITY, Volume 6, Nomor 1, September 2010: 59 – 64), dengan judul “Konsep Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Komunitas Berbasis Potensi Lokal (Studi Di Desa Wisata Bunga Sidomulyo, Kota Batu-Jawa Timur). Fokus penelitian untuk menganalisis bagaimana dan mengapa konsep pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan dan modal masyarakat setempat. Lokus dari penelitan ini adalah Desa Sidomulyo dan Punten Kota Batu Jawa Timur dengan temuan bahwa dilihat dari karakteristik geografis dan karakteristik sosial masyarakat kedua desa tersebut terlibat langsung dan aktif dalam pembangunan industri ekowisata di daerahnya, memiliki trasisi, nilai-nilai, dan norma-norma yang mendukung pengelolaan dan pelestarian lingkungan serta kebijakan pemerintah daerah pada industri ekowisata telah dipertimbangkan untuk memberikan

keselarasan bagi masyarakat dan lingkungan.

Selain itu Yunida Niken Hapsari melakukan penelitian dengan judul "Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Strategi Pembentukan Citra Perusahaan Sebagai Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Petrokimia Gresik". Fokus penelitan adalah implementasi salah satu program CSR perusahaan yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai upaya membentuk citra PT Petrokimia Gresik. Hasil penelitian ini adalah PKBL di PT Petrokimia Gresik selain memenuhi kewajiban sebagai BUMN, juga menjadi strategi perusahaan untuk membentuk citra positif. Pemberian bantuan dalam PKBL PT Petrokimia Gresik untuk membentuk citra perusahaan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu sentralistik yang mana sama dengan bina lingkungan dan desentralistik sama dengan program kemitraan.

Selanjutnya AHMAD TOBARI, 2010, dengan judul "Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) (Studi pada Program Kemitraan Perum Perumnas Regional VI Surabaya), Fokus penelitian adalah program Kemitraan didasarkan pada pembayaran angsuran dari pinjaman modal yang diberikan kepada Mitra Binaan dan lokusnya adalah Perum Perumnas regional VI Surabaya dengan hasil bahwa pembayaran angsuran pinjaman modal terbagi atas 3 kategori yaitu kredit lancar, kurang lancar dan macet. Dari 33 UKM yang menjadi Mitra Binaan Perum Perumnas Reg. VI, 21 diantaranya termasuk dalam kredit lancar, dari data tersebut dapat diketahui bahwa 21 Mitra Binaan berhasil meningkatkan kegiatan usahanya menjadi tangguh dan mandiri. Pemberdayaan yang dilakukan oleh PKBL Perum Perumnas Reg. VI dilaksanakan dengan memberikan pinjaman modal usaha dan pembinaan berupa diklat pengenalan internet kepada UKM yang menjadi Mitra Binaan PKBL Perum Perumnas Reg. VI.

Berikutnya adalah ALI USMAN, 2018, dengan judul "Pengaruh Program Kemitraan Dan program Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Industri Tepung Tapioka Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif ekonomi Islam (Studi CV Semangat Jaya, Desa Bangun Sari, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran). Fokus pengaruh program kemitraan tanggung jawab sosial industri tepung tapioka CV. Semangat Jaya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, bagaimana pengaruh program bina lingkungan tanggung jawab sosial industri tepung tapioka CV. Semangat Jaya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana pengaruh program kemitraan dan bina lingkungan tanggung jawab sosial industri tepung tapioka CV. Semangat Jaya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam. Kesimpulan bahwa implementasi program kemitraan dan bina lingkungan tanggung jawab sosial CV. Semangat Jaya berpengaruh positif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat sebesar 38,9%. Sedangkan sisanya 61,1% dipengaruhi oleh Indikator lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam sesuai dengan prinsipnya yaitu keseimbangan dan tanggung jawab dalam berbisnis.

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan, akan tetapi terdapat perbedaan fokus maupun lokusnya. penelitian pemberdayaan masyarakat terdahulu umumnya fokus pada menganalisis bagaimana dan mengapa konsep pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan dan modal masyarakat setempat, implementasi salah satu program *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), program Kemitraan didasarkan pada pembayaran angsuran dari pinjaman modal yang diberikan kepada Mitra Binaan, pengaruh program kemitraan tanggung jawab sosial

industri tepung tapioka CV. Semangat Jaya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, bagaimana pengaruh program bina lingkungan tanggung jawab sosial industri tepung tapioka CV. Semangat Jaya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana pengaruh program kemitraan dan bina lingkungan tanggung jawab sosial industri tepung tapioka CV. Semangat Jaya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam.

Sedangkan dalam penelitian ini fokus menelaah dan mengkaji seberapa kemanfaatan yang diterima oleh masyarakat setempat dari kegiatan program kemitraan dengan usaha kecil dan program bina lingkungan yang dilakukan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan serta menguraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam kegiatan program kemitraan dengan usaha kecil dan program bina lingkungan guna pemberdayaan masyarakat setempat di Wilayah PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan tersebut.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara holistik (utuh), jadi tidak mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai dari satu kesatuan yang utuh (Bogdan dan Tayor dalam Moleong, 2005: 4). Penelitian deskriptif bertujuan untuk: mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu, dan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Singarimbun dan Effendi, (1983: 4)

2.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber data diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu dari PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan dan dari media massa, majalah, jurnal dan buku-buku. Dan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang menjelaskan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan kuantitatif berupa jumlah kegiatan dan kemitraan yang telah berhasil diperoleh. Purwanto dan Sulistyastuti (2007: 20)

2.3 Metode Pengumpulan Data

2.3.1 Pendekatan yang diperlukan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*), dengan cara mempelajari berbagai literatur yang ada yang dipublikasian oleh instansi terkait yang berkaitan dengan obyek penelitian serta literatur-literatur, laporan-laporan, jurnal-jurnal, artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2.3.2 Observasi Lapangan (*Field Observation*) yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek dan sasaran yang akan diteliti dalam hal ini adalah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan.

2.3.3 Mengadakan Wawancara (*Indept Interview*) dengan narasumber atau pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dapat memberikan penjelasan secara memadai yang diharapkan dapat mewakili apa yang diinginkan dalam penelitian ini.

2.4 Metode dan Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu data dan informasi yang ada disajikan dalam bentuk tabulasi dan di interpretasi terhadap perubahan-perubahan dan perilaku masyarakat di

lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan, melalui berbagai variabel yang dijadikan ukuran sebelumnya untuk mengetahui secara pasti fenomena yang sesungguhnya terjadi diseputar pemberdayaan masyarakat melalui program kemitraan dengan usaha kecil dan program bina lingkungan di PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

3.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk mendorong terciptanya kekuatan dan kemampuan lembaga masyarakat untuk secara mandiri mampu mengelola dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri, serta mampu mengatasi tantangan persoalan di masa yang akan datang. Sunartiningsih (Ed), (2004:50).

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pembedayaan hendaknya jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), tetapi sebaliknya harus mengantarkan yang diberdayakan pada proses kemandirian. Sulistiyani (2004:79). Dengan demikian pemberdayan masyarakat tidak dapat dicapai dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan proses dengan memberikan kewenangan (*authoriy*), dan aksesibilitas terhadap sumber daya dan lingkungan yang akomodatif.

Dasar pandangan strategi pemberdayaan masyarakat adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan lagi melalui pemberdayaan di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, keterampian dan ketahanan masyarakat tersebut.

Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, karena keberhasilan dalam program seperti ini akan memberi dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun ini pemerintah telah mencanangkan program nasional pemberdayaan masyarakat. Program ini patut disambut positif oleh dunia usaha karena dunia usaha juga berkepentingan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di era *governance* pemberdayaan masyarakat bukan lagi merupakan tanggung jawab tunggal pemerintah, tetapi juga tanggungjawab semua elemen *governance*, yaitu negara, bisnis, dan masyarakat madani. Pemerintah, baik pusat atau daerah, memberdayakan masyarakat melalui program-program pembangunan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai elemen masyarakat melalui aksi-aksi sosial yang mereka lakukan memberi kontribusi tersendiri dalam pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, perusahaan juga merasa berkepentingan terhadap adanya pemberdayaan masyarakat, karena dalam diri perusahaan melekat empat tanggungjawab, yaitu tanggungjawab ekonomi, legal, etis, dan pilantropis. Hennigfeld, et al, (2006:6).

3.2. Tahap-tahap Pemberdayaan

Sebagaimana diuraikan dalam bab terdahulu bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses yang secara terus menerus memberikan semangat, kondisi, dan kemampuan dalam rangka menjaga kemandirian dan tidak mengalami kemunduran lagi. Untuk itu diperlukan proses belajar guna menjaga kemandirian masyarakat tersebut melalui tahapan-tahapan:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas.

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampian dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Sulistiyani (2004:83)

3.3. Indikator Pemberdayaan

Adapun sebagai indikator dalam pemberdayaan dapat kita lihat dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat guna :

1. Memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi
2. Memberdayakan dan mengembangkan kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

3.4. Masyarakat Setempat (*Community*)

Istilah *Community* dapat diterjemahkan sebagai "masyarakat setempat", istilah mana menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa. Apabila anggota-anggota sesuatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tadi disebut masyarakat setempat. Kriteria yang utama bagi adanya suatu masyarakat setempat adalah adanya *social relationships* antara anggota suatu kelompok. Dengan mengambil pokok-pokok uraian di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat setempat menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu di mana faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar di antara para anggotanya, dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Soemardjan dalam Soekanto (1990: 163). Dapat disimpulkan secara singkat bahwa masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Dasar-dasar daripada masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan masyarakat setempat tersebut. R.M. Mac Iver dan Charles H. Page (1961: 9).

Tempat tinggal (lokalitas) atau wilayah tertentu walaupun merupakan suatu dasar pokok, tidak cukup untuk membentuk masyarakat setempat, di samping itu harus ada suatu perasaan di antara anggota masyarakat bahwa mereka saling memerlukan dan bahwa tanah tempat mereka tinggal memberikan kehidupan kepada semuanya. Perasaan demikian, yang pada hakikatnya merupakan identifikasi dengan tempat tinggal, dinamakan perasaan komuniti (*community sentiment*). Adapun unsur-unsur perasaan komuniti antara lain adalah:

a. Seperasaan: dimana kepentingan-kepentingan si individu diselaraskan dengan kepentingan-kepentingan kelompok, sehingga dia merasakan kelompoknya sebagai struktur sosial masyarakatnya.
b. Sepenanggungan: setiap individu sadar akan peranannya dalam kelompok dan keadaan masyarakat sendiri memungkinkan peranannya dalam kelompok dijalankan, sehingga dia mempunyai kedudukan yang pasti dalam darah dagingnya sendiri.
c. Saling memerlukan: individu yang tergabung dalam masyarakat setempat merasakan dirinya tergantung pada "komunitas"-nya yang meliputi kebutuhan fisik maupun kebutuhan-kebutuhan psikologis. R.M. Mac Iver dan Charles H. Page dalam Soekanto (1990: 164)

3.5 *PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan*

Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat, swasta dan

pemerintah. Masyarakat dan swasta adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Baik pemerintah, masyarakat dan swasta memiliki peranan dalam memajukan kehidupan bersama di tengah masyarakat. Secara normatif dan kelembagaan pemerintah memiliki peranan: pengaturan (penegakan *rule of law*), pelayanan publik (*public service*), dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), PLOD UGM, (2004:49).

Peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dapat dilihat dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Dengan menimbang bahwa dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta tercapainya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, perlu ditingkatkan partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya, melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991 tentang perubahan Status Perusahaan Umum Pelabuhan I menjadi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I. Berdasarkan Pasal 1 butir (1) UUPT menyatakan, bahwa : “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya.”

Perusahaan yang biasa disebut dengan Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum (*legal entity*), yaitu badan hukum “mandiri” yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain . I.G. Rai Widjaya dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006: 2). Salah satu ciri yang membedakan PT dengan badan usaha lainnya dapat dilihat dari *doctrine of separate legal personality* yang pada intinya adalah adanya pemisahan kekayaan antara pemilik (pemegang saham) dengan badan hukum perusahaan itu sendiri.

Kata perseroan menunjuk pada modalnya yang terdiri dari sero (saham). Sedangkan kata terbatas menunjuk pada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja dalam Surya dan Yustiavandana (2006: 2). Dalam menjalankan kegiatannya, suatu perseroan diwakili oleh seorang direksi (*agents*) yang ditunjuk oleh para pemegang saham (*principals*). Menurut teori agensi, agent harus bertindak secara rasional untuk kepentingan principal-nya. Mishardi Wilamarta dalam Surya dan Yustiavandana (2006: 2). Agen harus menggunakan keahlian, kebijaksanaan, itikad baik, dan tingkah laku yang wajar dan adil dalam memimpin perseroan.

Pelabuhan Indonesia I berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 56 tahun 1991 adalah merupakan sebuah Perusahaan Perseroan (Persero) yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan pelabuhan di Indonesia yang wilayah tugasnya meliputi Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, dan Riau yang kemudian dibagi ke dalam 16 (enam belas) cabang pelabuhan. Dari ke enam belas cabang pelabuhan tersebut, yang menjadi pelabuhan utama adalah pelabuhan Belawan yang terletak di Propinsi Sumatera Utara. Dan sebagai

Perusahan Perseroan, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I ada di bawah naungan kementrian BUMN. Dengan demikian PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-236/MBU/2003, yaitu mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui : perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya, yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER -08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan untuk membentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I melaksanakan kegiatan kemitraan dan pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah yang ada di sekitar lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan agar masyarakat sekitarnya memperoleh manfaat dari keberadaannya dengan memberdayakan masyarakat tersebut.

PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan pada PT (Persero) Pelabuhan Wilayah I Cabang Utama Belawan.

Program pemberdayaan masyarakat melalui Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan di PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan ini dimulai sejak dikeluarkannya Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor KU 65/3/22/P.I-03, menindak lanjuti Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-236/MBU/2003 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 dengan menimbang bahwa kebijakan Pemerintah tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara serta untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi dalam pelaksanaan secara terpadu antara persoalan dengan instansi teknis terkait, mitra binaan dan masyarakat dalam rangka pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka tata kerja Badan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi dipandang perlu untuk disesuaikan.

Kemitraan dan Bina Lingkungan (KBL) adalah pembinaan dalam bentuk upaya pemberdayaan dan pengembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Mitra Binaan) agar memiliki kemampuan dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya sebagai wujud kepedulian Perseroan yang berkewajiban untuk melaksanakan program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Koperasi, yaitu dalam bentuk penyaluran Dana Pinjaman maupun berbentuk hibah, serta melaksanakan program Bina Lingkungan kepada masyarakat terutama yang berada disekitar daerah operasional perseroan. Adapun Dana KBL adalah dana yang berasal dari bagian laba perseroan yang dipergunakan untuk program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dan program Bina Lingkungan (BL).

Sumber dana Kemitraan dan Bina Lingkungan berasal dari laba perseroan yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal ini Kementrian BUMN, yaitu untuk dana Kemitraan sebesar antara 1% s/d 3% dan untuk Bina Lingkungan maksimum sebesar 1% setelah pajak. Dana yang berupa pengembalian pinjaman dan

bunga pinjaman dari mitra binaan. Dana Kemitraan dapat dibagi menjadi :

1. Dana Pinjaman Mitra Binaan yang digunakan:
   a) Untuk membiayai modal kerja, modal investasi, pinjaman dan penyertaan,
   b) Besarnya bantuan pinjaman yang diberikan untuk masing-masing mitra binaan maksimum 75% dari kebutuhan sesuai dengan proposal yang diusulkan setelah terlebih dahulu dievaluasi secara administrasi dan diteliti di lapangan;
2. Dana Hibah kepada Mitra Binaan yang dapat direalisir maksimum 30% dari dana yang tersedia untuk PUKK sebagai berikut:
   a) Untuk membiayai pendidikan/ pelatihan, pemagangan pemasaran, promosi, pengkajian dan penelitian bagi Usaha Kecil dan Koperasi,
   b) Besarnya Hibah yang diberikan kepada mitra binaan maksimum 75% dari kebutuhan sesuai dengan proposal yang diusulkan dan penyalurannya berdasarkan hasil evaluasi oleh perseroan melalui Bidang Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Dana Bina Lingkungan digunakan untuk mendanai program Bina Lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk Kegiatan Fisik dan Kegiatan Non Fisik untuk membiayai :

a) Bantuan Bencana Alam
b) Membantu Pendidikan Masyarakat Sekitar,
c) Membiayai Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum,
d) Bantuan Sarana Ibadah,
e) Membantu Peningkatan Kesehatan Masyarakat,
f) Pelestarian Seni dan Budaya Setempat,
g) Membantu Peningkatan Prestasi Olah Raga Masyarakat dan,
h) Membantu Peningkatan Keamanan Lingkungan.

Mitra Binaan adalah Usaha Kecil dan Koperasi serta pihak-pihak lain yang mendapat bantuan pembinaan. Adapun Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Sedangkan Koperasi adalah bentuk dari suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bertujuan mensejahterakan para anggotanya.

Ruang lingkup pelaksanaan Kemitraan dan Bina Lingkungan:

a. Wilayah dan Daerah Binaan program Kemitraan dan program Bina Lingkungan dilaksanakan di daerah operasional perseroan.
b. Kemitraan dilaksanakan dan dituju untuk pengembangan maupun pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi.
c. Bina Lingkungan dilaksanakan dan dituju untuk masyarakat terutama yang berada di sekitar daerah operasional perseroan.

4.2. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan.

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan dapat dilihat melalui Kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Kemitraan Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dalam usaha Pemberdayaan Masyarakat Setempat, adapun *Existing Condition* Internal PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan yang menggambarkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui :

1. Struktur Organisasi, yaitu didalam struktur organisasi ada bidang atau lembaga yang dipercayakan mengurus kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu bidang Kemitraan dan Bina Lingkungan

yang merupakan bagian dari Bidang Keuangan.

2. Jumlah pegawai administrasi (P/L) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, dimana jumlah pegawai administrasi laki-laki adalah 1080 orang dan jumlah pegawai administrasi perempuan adalah 190 orang dengan total pegawai administrasi adalah 1270 orang. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin yang ada di Cabang Utama Belawan adalah sebagai berikut

Tabel 1. Peta SDM dan Skema Jabatan Struktural
PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan
Tahun 2007

Pendidikan	Lk	Pr	Jlh
S-2	14	-	14
S-1	82	14	96
Sarjana muda	33	5	38
SLTA	125	32	157
SLTP	13	2	15
SD	4	-	4
Jumlah	**271**	**53**	**324**

Sumber: Olahan Peneliti, 2007

Dilihat dari jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin tersebut di atas maka dapat kita lihat bahwa jumlah pegawai yang ada di Cabang Utama Belawan hanya sekitar 26 % dari jumlah keseluruhan pegawai yang ada di lingkungan PT (Persero) Pelabuhan I. Dimana mereka melakukan tugas dan fungsinya lebih besar dari pada cabang-cabang lainnya yang ada di lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I yang relatif lebih kecil.

3. Golongan kepangkatan pegawai PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I yaitu: golongan IV berjumlah 25 orang (a = 18 orang, b = 4 orang, c = 3 orang), golongan III berjumlah 634 orang (a = 146 orang, b = 208 orang, c = 190 orang, d = 90 orang), golongan II berjumlah 601 orang (a = 46 org, b = 248 org, c = 123 org, d = 184 org), dan golongan I berjumlah 10 orang (c = 2 org, d = 8 org). Bandingkan dengan jumlah pegawai berdasarkan golongan di Cabang Utama Belawan

Tabel 2
Peta SDM dan Skema Jabatan Struktural Berdasarkan Golongan
PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan
Tahun 2007

Sumber: Olahan Peneliti

Demikian juga halnya bila dilihat dari jumlah golongan kepangkatan yang ada di cabang utama belawan hanya 8 % yang gol. IV, 21 % gol. III, 27 % gol. II, dan 70 % gol. 1.

4. Masa kerja pegawai PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, s/d 5 tahun 92 orang, s/d 10 tahun 283 orang, s/d 15 tahun 192 orang, s/d 20 tahun 147 orang, diatas 20 tahun 556 orang. Bandingkan dengan jumlah masa kerja pegawai di Cabang Utama Belawan.

Gol.	a	b	C	D	E	Jlh
IV	3	-	-	-	-	3
III	32	64	31	18	-	145
II	16	97	9	47	-	169
I	-	-	1	6	-	7
Jumlah	**51**	**161**	**41**	**71**	**-**	**324**

Tabel 3
Peta SDM dan Skema Jabatan Struktural Berdasarkan Masa Kerja PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan Tahun 2007

Masa Kerja	Jumlah
s.d. 5 tahun	10
s.d. 10 tahun	65
s.d. 15 tahun	38
s.d. 20 tahun	86
> 20 tahun	125
Jumlah	**324**

Sumber: Olahan Peneliti

Dalam hal masa kerja pegawai yang ada di lingkungan PT (persero) Pelabuhan I, di cabang utama belawan terdapat sekitar 10 % yang memiliki masa kerja sampai dengan 5 tahun di banding dengan pegawai keseluruhan, sekitar 40 % yang masa kerjanya mencapai 10 tahun, sekitar 19 % yang masa kerjanya sampai dengan 15 tahun dibanding jumlah pegawai keseluruhan dengan masa kerja yang sama, sekitar 60% yang memiliki masa kerja sampai dengan 20 tahun dan sekitar 21% yang masa kerja di atas 20 tahun dibanding masa kerja pegawai yang sama di seluruh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I.

5. Jumlah tenaga honorer (P/L) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I tidak ada lagi. Hal ini dikarenakan fungsi tenaga honorer telah digantikan oleh tenaga magang yang berasal dari Sekolah-sekolah Kejuruan yang ada di sekitar PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I, khususnya di Cabang Utama Belawan.

Sedangkan *Existing Condition External* PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan yang menggambarkan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah dengan adanya mitra binaan di setiap cabang PT (Persero) Pelindo I, khususnya Cabang Belawan yang berjumlah 367 orang, 5 (lima) CV, dan 2 (dua) Koperasi.

4.3 Aturan yuridis, kebijakan, program, proyek

Adapun aturan yuridis dari kebijakan yang diambil berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat adalah berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang diikuti dengan Salinan

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan dijalankan berdasarkan Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I tentang Kemitraan dan Bina Lingkungan. Kebijakan ini timbul karena adanya pertimbangan untuk mendorong kegiatan guna menumbuhkan dan meningkatkan ekonomi rakyat guna menciptakan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Pasal 88 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, ketentuan mengenai penyisihan dan penggunaan laba BUMN untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi dan pembinaan masyarkat sekitar BUMN. Bahwa dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, perlu ditingkatkan partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya, melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan, diatur dengan keputusan menteri.

Aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan adalah Direksi melalui rapat direksi, Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang didalam adalah Kementerian BUMN. Langkah-langkah yang ditempuh dalam perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat adalah melalui rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris yang mengacu kepada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara, yang kemudiaan diikuti dengan rapat di tingkat Direksi sampai pelaksanaannya di tingkat Bidang yang membawahi Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Dalam hal perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat tidak mengikutsertakan masyarakat, karena pemberdayaan yang dilakukan masih sebatas pemberian pinjaman modal usaha dan pengenalan hasil usaha yang dilakukan masyarakat yang di bina pada setiap kegiatan promosi dan pameran hasil industri dan kerajinan masyarakat yang di adakan oleh pemerintah maupun swasta. Model yang diterapkan dalam perumusan kebijakan adalah berdasarkan Struktural Organisasi, yaitu bahwa kebijakan yang diambil di tingkat lembaga adalah berdasarkan kebijakan dari tingkat Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham. Kriteria yang digunakan adalah berdasarkan program Kemitraan dan program Bina Lingkungan sebagaimana telah ditetapkan oleh direksi berdasarkan keputusan Rapat Pemegang Saham yang meliputi: pemberian pinjaman, hibah, bantuan bencana alam, pendidikan dan pelatihan, pengembangan sarana dan prasarana umum, pelayanan kesehatan dan sarana ibadah. Kaitan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan di tingkat pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Negara adalah bahwa kegiatan pemberdayaan tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan menteri BUMN yang merupakan bagian dari pemerintahan pusat.

Adapun konsultan yang terlibat biasanya dari kalangan perguruan tinggi atau Universitas, seperti Universitas Riau dan Universitas Asahan. Adapun kelebihan dari kebijakan ini adalah dapat membantu mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha guna meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Kekurangannya adalah kurangnya anggaran yang disediakan/dialokasikan guna mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut, dan macetnya pengembalian pinjaman yang telah diberikan kepada masyarakat yang di bina. Instansi yang terkait dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat adalah instansi pemerintah,

swasta dan perguruan tinggi. Pemerintah diharapkan memberikan dukungan bagi setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mempermudah proses pembuatan ijin usaha, memberikan bantuan penyuluhan mengenai dunia usaha, hukum dan kegiatan pelatihan dan pendidikan. Dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan akan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan di sekitar lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, sehingga secara tidak langsung akan menumbuhkan suasana lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Adapun program yang telah dicapai adalah seluruh program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik bekerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta lainnya, baik dalam program Kemitraan maupun Bina Lingkungan, seperti:

1. Dana Pinjaman Mitra Binaan yang digunakan pada periode 2006/2007 oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan adalah sebesar Rp. 257.000.000 kepada 10 pengusaha kecil dan menengah (UKM), masing-masing adalah sebagai berikut (Gema Pelabuhan, April 2007:23) :
   a) H. Bustami, unit usaha konvensi celana jeans
   b) Deborawati Siambaton, penjual bunga hidup
   c) Wahidin Nasution, bengkel roda dua
   d) M. Hadi Prawiro, unit usaha salon
   e) Humala Alamsyah, doorsmeer kendaraan
   f) Ali Bosar, usaha kedai kelontong
   g) Ruswendi SE, foto studio dan foto copy
   h) Syamsul Rizal, penggilingan jagung
   i) Berman Sianturi, penjualan bunga hidup
   j) Fashilah Azis, unit usaha penjualan busana muslim.

Penyerahan berlangsung di Aula Bandar Deli Cabang Pelabuhan Belawan pada tanggal 28 Maret 2007, yang dihadiri oleh Camat Medan Belawan dan diwakilkan oleh Sekwilcat H. Abdul Chalik, para undangan dan mitra binaan. Dan pada bulan Agustus tanggal 16 dengan mengambil tempat di Aula Tacoma Cabang Pelabuhan Belawan, General Manager Pelabuhan I Cabang Belawan Drs. H. Embay, SP, MM kembali menyerahkan bantuan modal kepada sebelas mitra binaan sebesar Rp. 460.000.000,-, yaitu:

a) Robiah, Kedai Kelontong, sebesar Rp. 40.000.000,-
b) Bachtiar Laut, Swalayan 77, sebesar Rp. 50.000.000,-
c) Suyono, penjualan pupuk dan obat-obatan pertanian, Rp.35.000.000,-
d) Syamsul Bahri, penyewaan perlengkapan pesta dan pembuatan perabotan rumah tangga, Rp. 50.000.000,-
e) M. Saman, pembuatan kripik ubi, Rp. 20.000.000,-
f) Saut Pakpahan, Warung Internet Leo Warnet Rp. 38.000.000,-
g) H. Misley Effendi, pondokan mahasiswa Hj Riny Rp.32.000.000,-
h) Jhony Nadeak, Rental Komputer Rp.45.000.000,-
i) Torang Mula Nadeak, kedai UD Harapan Rp. 50.000.000,-
j) Manguliman Tampubolon, Foto Copy dan penjualan ATK, UD Ganda Photo Rp. 50.000.000,-
k) Budiarti Sembiring, jual beli emas, Toko Emas Sembiring Rp.50.000.000,-

Penyerahan modal usaha tersebut dihadiri Camat Medan Kota Belawan yang diwakili oleh Sekwilcat Abdul Chalik, BA beserta undangan. Drs H. Embay SP, MM dalam sambutan antara lain menyatakan: Peranan pemerintah melalui badan usaha milik negara (BUMN) agar dapat menyisihkan sebahagian laba perusahaan guna membantu lingkungan disekitar perusahaan yang disebut sebagai program pemberian pinjaman kepada pengusaha kecil dan menengah. Selama ini Pelabuhan I Cabang Utama Belawan turut serta melaksanakan amanah surat

keputusan tersebut dalam memberikan pinjaman PUKK kepada pengusaha kecil dan menengah serta koperasi dalam mengembangkan usahanya, khususnya di wilayah Belawan, Binjai dan Deli Tua. Penyerahan pinjaman merupakan penyerahan pinjaman PUKK tahap kedua untuk tahun 2007. (Gema Pelabuhan, Agustus 2007:20).

Sampai dengan tahun 2007 PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan telah menyalurkan dana Kemitraan mencapai **Rp. 11.112.200.000,-** dari jumlah keseluruhan di bagikan **340 unit pengusaha** yang ada, untuk **Kota Medan 245 unit, Kabupaten Deli Serdang 23 unit, Kabupaten Langkat dan Binjai 27 unit, Kabupaten Karo 25 unit, dan Kabupaten Serdang Bedagai 20 unit yang terdiri dari kegiatan home industri, perdagangan, pertanian, perternakan, jasa dan unit usaha lainnya yang dapat mendukung dan memberdayakan masyarakat secara ekonomi**. Besarnya bantuan pinjaman yang diberikan untuk masing-masing mitra binaan maksimum 75% dari kebutuhan sesuai dengan proposal yang diusulkan setelah terlebih dahulu dievaluasi secara administrasi dan diteliti di lapangan. Adapun kegiatan ini adalah guna membantu mengembangkan kegiatan usaha kecil dan menengah (UKM) yang ada di sekitar lingkungan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I agar semakin berkembang dan maju dalam rangka membantu penguatan ekonomi masyarakat. Kegiatan Mitra Binaan adalah kegiatan pemberian bantuan berupa pinjaman modal yang harus dikembalikan dengan cara mencicil atau pembayaran bertahap kepada pihak PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan dengan bayaran yang dianggap dapat dijangkau oleh Mitra Binaan tersebut, dimana hasil dari pembayaran atau pengembalian pinjaman tersebut akan disalurkan kembai kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan bantuan modal usaha bagi peningkatan kegiatan usaha Mitra Binaan tersebut.

2. Dana Bina Lingkungan digunakan untuk mendanai program Bina Lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk Kegiatan Fisik dan Kegiatan Non Fisik pada tahun 2007 (Laporan Realisasi Bina Lingkungan 2007) untuk membiayai:
   a) Bantuan Bencana Alam, seperti bantuan korban kebakaran di Uni Kampung dan di Kel. Belawan II sebesar Rp. 90.990.000,-, Korban Bencana Alam di Sumut pada tahun 2006 sebesar Rp. 24.775.000,- yang disalurkan melalui kantor pusat, dengan total biaya **Rp.115.765.000,-**. (Gema Peabuhan, Juli 2007: 11)
   b). Membantu Pendidikan Masyarakat Sekitar, dengan memberikan Bea Siswa kepada: 80 orang siswa SD Muhammadiyah (Rp. 9.600.000,-), 30 murid SMK dan SLTP Muhammadiyah (Rp. 8.975.000,-), sekolah TK BM Belawan (Rp. 62.340.000,-), Renovasi SD-SMP HKBP Jln Kampar (Rp. 27.400.000,-) dengan Total **Rp. 108.315.000,-**
   c) Membiayai Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum, seperti: pengadaan becak dan bak sampah untuk Kel. Belawan I dan Belawan II sebesar Rp. 60.600.000,-, pengadaan Aksesori Lampu Hias Taman Rp. 10.000.000,-, dengan total **Rp.70.600.000,-**.
   d) Bantuan Sarana Ibadah, seperti renovasi Musholla Al-Istiqomah gg. VII (Rp. 14.290.000,-), Gereja HKBP Betania Sicanang (Rp. 22.110.920,-), Musholla Khairun Nisa'a (Rp. 12.159.000,-), Mesjid Al-Istiqomah (Rp. 20.650.000,-), Mesjid Al-Muhajirin Sicanang (Rp. 10.796.000,-), Mesjid Taqwa Muhammadiyah Sicanang (Rp. 17.506.000,-), Gereja HKBP Efrata Martubung (Rp. 23.450.000,-), Musholla Nurul Ichwan Bagan Deli (Rp. 15.505.000,-), Gereja HKI Blok 21 Sicanang (Rp. 16.420.000,-), Musholla Nurul

Ihsan Jln. Indragiri Belawan (Rp. 10.067.500,-), Musholla Nurul Iman Jln.Talang Belawan (Rp. 15.200.000,-) dengan total **Rp. 178.154.420,-**.

e) Membantu Peningkatan Kesehatan Masyarakat, belum terlaksana.
f) Pelestarian Seni dan Budaya Setempat, belum terlaksana.
g) Membantu Peningkatan Prestasi Olah Raga Masyarakat dan,
h) Membantu Peningkatan Keamanan Lingkungan juga belum terlaksana. Karena masih sebatas memberikan Latihan Dasar Bina Mental dan Disiplin terhadap Satpam Pelabuhan Belawan dan UPTK (Unit Terminal Peti Kemas). (Gema Pelabuhan, Agustus 2007:7)

Adapun total biaya yang dikeluarkan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan untuk kegiatan Bina Lingkungan adalah sebesar **Rp.409.294.420,-.** Kegiatan Bina Lingkungan adalah kegiatan yang sifatnya charity (pemberian sumbangan sukarela) dan tidak mengharapkan imbalan langsung dari masyarakat yang dibina, tetapi hanya sebatas memberikan partisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar lingkungan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan.dengan harapan masyarakat sekitar dapat mengenal dan menerima keberadaan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan yang beroperasi di lingkungan masyarakat tersebut.

4.4 Manfaat yang Diterima Oleh Masyarakat Setempat dari Kegiatan Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan tersebut.

Adapun hasil pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan adalah dengan adanya 340 jenis usaha perorangan yang dibina melalui peminjaman modal usaha di lingkungan sekitar PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, dan selain jenis usaha perseorangan tersebut di atas, terdapat pula 2 (dua) Unit Koperasi, dan 5 (lima) perusahaan yang berbentuk CV. Distribusi output dari pemberdayaan masyarakat yang di bina adalah berupa hasil industri rumah tangga dan kerajinan tangan yang hasilnya telah di bawa ke setiap kegiatan pameran industri kecil yang diadakan di tingkat provinsi maupun nasional. Melalui kegiatan pemberdayaan ini juga turut mengenalkan kegiatan yang telah dilakukan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan

PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Pelabuhan Belawan sebagai salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan laut terus berupaya untuk memajukan usaha para mitra binaannya, dengan melakukan pembinaan, pemberian pinjaman modal, penyuluhan, sampai usaha promosi ke tingkat Nasional. Hal ini dilakukan agar mitra binaan tersebut dapat mandiri dan melakukan usaha kerjasama dengan badan usaha lain, tanpa lagi tergantung pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Pelabuhan Belawan. Sebagian Mitra Binaan tersebut sudah ada yang menikmati karena berhasil. Hal ini terbukti bahwa Mitra Binaan yang berhasil tersebut sesuai dengan arahan dari pihak Manajemen ketika menyalurkan pinjaman, bahwa mitra yang berhasil dan maju akan diikutkan dalam pameran baik yang dilaksanakan ditingkat lokal maupun di tingkat nasional. Adapun yang sudah berhasil diikutkan pada pameran di tingkat nasional yang baru dilakukan pada tanggal 23 hingga 27 Mei yang lalu, bertempat di Convention Centre Hall B Jakarta, adalah UD. Robinhud pimpinan Drs. R. Tampubolon yang memamerkan kerajinan tangan berupa ulos yang merupakan ciri khas dari Sumatera Utara yang dalam pameran ini berhasil menjual ulos mencapai 20 sampai dengan 50 ulos perhari, dan UD. Guccy Sepatu pimpinan Azri SmHk, SE yang memamerkan sepatu Guccy dan berhasil menjual hampir 60 pasang per hari dalam pameran produk

Interior dan Craff (INCRA) TAHUN 2007 yang juga dihadiri oleh Menterei Perindustrian RI, Fahmi Idris (Gema Pelabuhan, Juni 2007: 11).

Sebelum mengikuti pameran INCRA 2007 ini, empat mitra binaan Cabang Pelabuhan Belawan juga telah mengikuti perayaan tahunan Pekan Raya Sumatera Utara di Medan yang berlangsung pada 12 April – 13 Mei 2007, yaitu : Usaha Srikandi pimpinan Ir. Suwito Darmo, seorang produsen pakaian kebaya bordir wanita, Usaha Bustami pimpinan H. Bustami seorang produsen celana jeans, Usaha Dagang Guccy pimpinan Azri SmHK yang memproduksi sepatu, dan Usaha Alhafiz pimpinan Syahrial produsen pakaian Muslim pria dan baju koko, yang mana kegiatan ini didukung oleh management Cabang Pelabuhan Belawan baik secara moril maupun materil.

4.5 Mekanisme Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan.

Adapun mekanisme pelaksanaan penyaluran dana program Kemitraan dan Program Bina Lingkungn di PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I adalah sebagai berikut:

I. Program Kemitraan

1. Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan

a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut:
   1) Nama dan alamat unit usaha;
   2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
   3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
   4) Bidang Usaha;
   5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
   6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha);
   7) Rencana usaha dan kebutuhan dana.

b. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan;

c. Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur bersangkutan;

d. Pemberiran pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontra yang sekurang-kurangnya memuat:
   1) Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
   2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
   3) Jumlah pinjaman dan peruntukkannya;
   4) Syarat-syarat pinjaman (Jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrsai pinjaman).

e. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur lain.

2. Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan pertahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri;

3. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli, maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar 6% (enam persen) atau sesuai dengan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas.

4. Apabila pinjaman/ pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil, maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10:90) sampai dengan maksimal 50 % (50:50).
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga terhadap rasio bagi hasil untuk BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur.

II. Program Bina Lingkungan.

1. Tata cara penyaluran bantuan dana Program Bina Lingkungan BUMN Pembina:
   a. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survei dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha BUMN Pembina setempat;
   b. Pelaksanaan Program Bina Lingkugan dilakukan oleh BUMN Pembina yang bersangkutan.
2. Tata cara penyaluran bantuan dana Program BUMN Peduli ditetapkan oleh Menteri.

4.6 Hambatan/Kendala dalam Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan

Adapun masalah yang dihadapi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dari aspek internal adalah kurangnya anggaran bagi kegiatan pemberdayaan baik di dalam lingkungan PT (Persero) Pelindo I maupun masyarakat sekitarnya. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi adalah tidak lancarnya pengembalian pinjaman modal yang diberikan kepada mitra binaan sehingga menghambat proses pemberdayaan selanjutnya.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam kegiatan program kemitraan dengan usaha kecil dan program bina lingkungan guna pemberdayaan masyarakat setempat di Wilayah PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia I adalah :

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi (internal dan eksternal)

1. Birokrasi, secara birokrasi tidak ada hambatan dalam melakukan kegiatan pemberdayaan tersebut, karena didukung oleh peraturan dan kebijakan oleh lembaga yang berwenang.
2. Koordinasi antar pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tersebut cukup baik, mulai dari tingkat pelaksana, pemerintah daerah, sampai ketingkat yang lebih tinggi.
3. Sumber Daya Manusia yang mendukung kegiatan pemberdaaan masyarakat di lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I cukup memadai, karena petugas pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut telah dibekali dengan pelatihan dan pendidikan yang juga melibatkan perguruan tinggi.
4. Dana yang disalurkan berasal dari laba perusahaan sesuai dengan kebijakan yang diambil dan peraturan yang telah di buat mulai dari tingkat direksi sampai Pemegang Saham.
5. Sarana-prasarana yang disediakan berupa berupa gedung-gedung perkantoran yang melayani kegiatan pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi rumah ibadah dan prasarana umum seperti jalan, tempat pertemuan dan sebagainya.
6. Partisipasi masyarakat adalah berupa penciptaan lapangan kerja dan industri rumah tangga, melakukan pembayaran pengembalian pinjaman modal secara tertib dan teratur, dan mengembangkan usaha yang telah dibuat.

b. Faktor-faktor yang menjadi Kendala dalam Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT (Persero) Pelabuhan Indonesia Cabang Utama Belawan adalah:

Kendala yang dihadapi biasanya berkaitan dengan pengembalian pinjaman modal yang diberikan kepada mitra usaha yang di bina, karena :

1. Usaha yang tidak berjalan dengan baik akibat krisis yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat yang ada di sekitar PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Utama Belawan, sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat lemah dan berkurangnya omzet penjualan mitra binaan.
2. Kurangnya pengetahuan mitra binaan dalam memasarkan usahanya ke luar dari daerahnya atau sampai ke luar negeri, karena yang dipromosikan biasanya yang sudah baik dan tidak merasa kesulitan dalam pengembalian pinjaman .
3. Terbatasnya tenaga untuk memberikan pelatihan dan pendidikan bagi para mitra binaan.
4. Masih kurangnya anggaran yang disediakan karena keterbatasan dana yang ada pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I khususnya Cabang Utama Belawan. Hal ini dikarenakan alokasi dana bagi kegiatan pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan berasal dari laba perusahaan sesuai dengan kebijakan yang diambil dan peraturan yang telah di buat mulai dari tingkat direksi samapai kepada Pemegang Saham yang dalam hal ini adalah Menteri BUMN.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberdayaan Masyarakat di PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I masih sebatas pemberian pinjaman modal usaha, bantuan terhadap korban bencana alam, bantuan (sumbangan) pendidikan dan bantuan pembangunan fasilitas umum. Hal ini lebih mengedepankan dimensi ekonomi dari pembangunan dari pada dimensi sosial dan iptek.
2. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya dana bagi pelaksanaan program bina lingkungan dan kemitraan di PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I serta kurangnya tenaga lapangan yang bertugas memberikan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat binaan.
3. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan tidak langsung dilibatkannya masyarakat sekitar dalam pengambilan kebijakan guna mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut.
4. Dalam penyelesaian masalah cenderung membiarkan masalah terjadi, seperti kalau pengembalian modal pinjaman kerja mengalami kendala, maka pihak PT (Persero) Pelabuhan I Cabang Uatma Pelabuhan I hanya menagihnya ke tempat usaha para mitra tersebut, dan bila belum ada maka akan di tagih pada bulan berikutnya tanpa ada pendampingan bagaimana agar masalah tersebut dapat segera di atasi dan pengembalian pinjaman dapat berjalan dengan lancar.

B. Saran

1. Hendaknya dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas memberikan bantuan pinjaman modal, tetapi diikuti dengan pelatihan dan pendidikan yang dapat meningkatkan kemampuan individu dalam memberdayakan diri pribadi, keluarga maupun masyarakat sekitarnya.
2. Hendaknya dalam memberikan bantuan pendidikan tidak hanya sebatas pemberian hibah, tetapi memberikan pendampingan dan beasiswa sampai selesainya pendidikan siswa yang di bina tersebut.
3. Melibatkan anggota masyarakat sekitar dalam setiap pengambilan kebijakan guna mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga hasil yang ingin di capai dapat maksimal dan efektif. Untuk itu diperlukan proses belajar guna menjaga kemandirian masyarakat tersebut melaui tahapan-tahapan :

a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku sadar dan peduli sehingga masyarakat setempat yang akan diberdayakan merasa membutuhkan peningkatan kapasitas.
b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan, dan keberanian berusaha/ berwiraswasta agar terbuka wawasan dan memberikan keterampian dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.
d. Tahap peningkatan kemampuan modal usaha, sehingga masyarakat setempat yang telah memiliki wawasan pengetahuan, kemampuan intelektual, dan kecakapan-keterampilan dalam bidang tertentu, tetapi tidak memiliki kemampuan modal usaha, dapat terbantu menyalurkan pengetahuan, kemampuan inteletual dan kecakapan-keterampilannya tersebut dalam bentuk dunia kerja maupun usaha.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulisan artikel ini dapat tersusun karena uluran tangan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepad pihak-pihak tersebut, utamanya kepada segenap Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I dan Cabang Utama Belawan - Sumatera Utara, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sadar bahwa artikel ini masih banyak kekurangannya, karena itu kepada semua pihak yang berkompeten diharapkan kritikan dan masukkannya, terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, (2012). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rhineka Cipta

Aziz, Arnicun, Editor, (1994). Lima GBHN, Dihimpun Oleh Redaksi Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1993). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka.

Echols, John, M. dan Hassan Shadily, (2004). Kamus Indonesia Inggris An Indonesian – English Dictionary, Jakarta: PT Gramedia.

Hartomo, H, Aziz (2008). Ilmu Sosial Dasar, Jakarta: Bumi Aksara.

Heyneardhi, Henry, (2005). Kritis Memahami CSR, Jakarta: The Business Watch Indonesia.

Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, Nomor : PR.01/ 1/ 4/ P1-03 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Cabang Pelabuhan, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I.

Moleong, Lexy, J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Nazir, Moh. (2013). Metodologi Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.

PLOD UGM, DEPDAGRI, (2004) Mengelola Dinamika Politik dan Sumber daya Daerah, Yogyakarta: Jogja Global Media.

Purwanto, Agus, Erwan, dan Sulistyastuti, Dyah Ratih, (2011). Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial, Yogyakarta, Penerbit Gava Media

Riyadi, Eddie, 2007, Tanggung Jawab Bisnis terhadap HAM, Kompas 22 Maret.

Siagian, Sondang, P. (2012). Administrasi Pembangunan, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Singarimbun, Masri, EffendiSofian, (2009). Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES.

Soekanto, Soerjono, (2012). Sosiologi: Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers

Sulistiyani, Ambar T, (2017). Kemitraan, Dan Model-Model Pemberdayaan, Edisi Kedua, Yogyakarta, Gava Media.

Sunartiningsih, Agnes, (2004) Pemberdayaan Masyarakat Desa, melalui Institusi Lokal, Yogyakarta, Aditya Media.

Suparmoko, M, dan Irawan (2008). Ekonomi Pembangunan, Edisi Keenam, Yogyakarta: BPFE

Supriatna, Tjahya, (1997). Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan, Bandung: Humaniora Utama Press, Anggota IKAPI.

Surya, Indra, dan Yustiavandana, Ivan, (2008). Penerapan Good Corporate Governence: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Jakarta: Kencana.

Tanaya, Jimmy, (2004). Tanggung Jawab Sosial Korporasi, Jakarta: The Business Watch Indonesia.